

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perikatan*, Pustaka Yudistia, Yogyakarta.
- Amin Suprihatini, 2009, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Jakarta.
- Angger Wijaya, 2000, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hanif Nurholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah*, PT. Rajagfindo Persada, Jakarta.
- Mardalis, 2008, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Nanang Martono, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ny. Sumber Saaparin, 1986, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sodiki Achmad, 1997, *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*, Arena Hukum, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2000, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan asset desa.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
8. Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Desa Kajen Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Internet

<http://walangkopo99.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli.html>

<http://www.gurupendidikan.com/pengertian-pendapatan-menurut-para-ahli-beserta-jenisnya>

<http://www.pengertianparaahli.net>.5 april 2017

